



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAIFUL UMAM
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 450546

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.460.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/10 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/120 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/10 m2 di KAB / KOTA JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/39 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 554.000.000

1. MOTOR, PIAGIO VESPA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOBIL, BYD ATTO 3 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000
3. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. 25.000.000



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	200.000.000
Sub Total	Rp.	4.274.000.000
III. HUTANG	Rp.	400.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.874.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.